BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, yang berarti penelitian hukum yang mengkaji hukum dengan mengkonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Jadi jenis penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.⁵² Oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap hak kebebasan bergerak masyarakat Kota Banjarmasin pada masa Pandemi *Covid-19*.

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan dengan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menalaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada di Indonesia kaitannya dengan tugas negara Indonesia yang melindungi warga negaranya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dalam hal ini berkaitan dengan

⁵²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 1969), hlm. 83.

permasalahan yang di angkat penulis.⁵³ Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menalaan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banjarmasin tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak kebebasan bergerak masyarakat Kota Banjarmasin pada masa Pandemi *Covid-19*.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin termasuk mesin utama penggerak laju insiden kasus *Covid-19* di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada 4 Juni 2020 Kalimantan Selatan mencatat tambahan kasus baru sebanyak 109, disusul DKI Jakarta sebanyak 94 dan Jawa Timur sebanyak 54 kasus. Hal ini membuat Kalimantan Selatan termasuk salah satu Provinsi yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dalam penyebaran *Covid-19*.⁵⁴ Dan diantara kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin termasuk yang paling tinggi angka penyebaran Kasus *Covid-19* di banding kota lainnya di Kalimantan Selatan, berikut penyebaran *Covid-19* di Provinsi Kalimantan Selatan pada 4 Juni 2020:

Tabel 3.1 Angka penyebaran *Covid-19* di Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/Kota	Positif	Dirawat	Sembuh	Meninggal
1.	Tanah Bumbu	81	64	16	1

⁵³Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

⁵⁴<https://banjarmasin.tribunnews.com/amp/2020/06/04/update-covid-19-kalsel-masuk-sorotan-presiden-joko-widodo> (23 Juli 2022 pukul 21.30 WITA)

2.	Kota Baru	10	9	1	-
3.	Banjar	116	100	9	7
4.	Barito Kuala	87	82	4	1
5.	Tapin	41	37	3	1
6.	HS. Selatan	8	3	4	1
7.	HS. Tengah	3	1	2	-
8.	HS. Utara	7	6	-	1
9.	Tabalong	8	2	6	-
10.	Tanah Bumbu	134	124	8	2
11.	Balangan	3	1	2	-
12.	Banjarmasin	580	477	25	78
13.	Banjarbaru	64	42	21	1
Kalimantan Selatan		1.142	958	101	93

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Kalimantan Selatan

Selain Kota Banjarmasin termasuk angka tertinggi dari Kabupaten/Kota lainnya di Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin juga ikut menerapkan kebijakan pembatasan bergerak masyarakatnya di luar rumah melalui penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti penelitian ini di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah:
 - a. 1 orang dari Kementerian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin karena Kanwil Kemenkum HAM sangat berperan dalam sistem penegakan hukum di situasi pandemi *Covid-19*
 - b. 1 orang dari Kementerian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, akibat pandemi *Covid-19* ini tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga perekonomian masyarakat, maka dari itu perlu juga data dari Kementerian Perekonomian dan SDA ini, untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian yang tepuruk akibat pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah untuk beraktifitas di Masa Pandemi *Covid-19*.
 - c. 1 orang dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, dampak utama dari virus *Covid-19* adalah terjadinya krisis kesehatan, maka dari itu penelitian ini memerlukan data dari Dinkes untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan *Covid-19* dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghentikan wabah virus yang sangat berbahaya ini.

- d. 5 orang dari Masyarakat, dalam penelitian ini dipilih 5 orang dari masyarakat Kota Banjarmasin, yaitu berdasarkan profesi yang terkena dampak dari pembatasan kebebasan bergerak di masa *Covid-19* ini, yaitu mulai dari driver ojek online, karyawan swasta, pedagang, mahasiswa, dan ibu rumah tangga yang pernah menjadi pasien *Covid-19*.

2. Data Sekunder

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat, yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).
 - 4) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 37 Tahun 2021 atas perubahan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 33 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan embatan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penangan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kota Banjarmasin.

- 5) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian *Covid-19*.
 - 6) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4 *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian. berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur, hasil penelitian, makalah, jurnal dan lain sebagainya.⁵⁵ Bahan bacaan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dari beberapa buku-buku, di antaranya yaitu, dari Satijipto Raharjo yang berjudul Ilmu Hukum, C.T.S Kansil dan Christine S.T. Kansil dengan judul bukunya Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Anna Yuliana Ruswanto dan Firman Gustaman dengan judul *Covid-19, Pandemi yang menyerang bumi kami* dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Atas Hak Kebebasan Bergerak di Masa Pandemi *Covid-19*.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulisan dalam menerjemahkan

⁵⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), hlm. 51.

istilah yang digunakan. Bahan ini didapat dari kamus hukum, ensiklopedia, majalah dan lain sebagainya.⁵⁶ Penjelasan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penulisan dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang sempurna.⁵⁷ Oleh karena itu penulis dalam mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan tentang perlindungan hukum atas hak kebebasan bergerak di masa darurat *Covid-19* adalah :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah pengumpulan data atau keterangan untuk mencapai tujuan penelitian yang dilakukan dengan melalui kegiatan komunikasi verbal berupa percakapan langsung yang dilakukan oleh dua pihak untuk mendapatkan apa yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian.⁵⁸ Tujuan wawancara dalam penelitian ini

⁵⁶Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 296.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 105.

⁵⁸S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara 1996), hlm. 135.

adalah untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat Kota Banjarmasin di Masa Pembatasan Kebebasan Bergerak pada saat Pandemi *Covid-19*.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan yang diteliti secara langsung terhadap yang tidak hanya terbatas pada orang tetapi juga pada objek-objek lain yang diteliti.⁵⁹ Dalam penelitian ini yang akan di amati adalah perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin pada masa pembatasan hak kebebasan masyarakat di masa pandemi *Covid-19*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, undang-undang, buku, surat kabar, dan sebagainya.⁶⁰ Teknik ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen seperti berita yang ada di website detik.com, kompas.com dan lain sebagainya. Selain itu, data dokumen berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, kondisi *Covid-19* di lokasi penelitian.

⁵⁹Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi, 1995), hlm. 145.

⁶⁰Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek* (Jakarta: Bima Aksara, 1989), hlm. 202.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah semua data dari hasil penelitian ini dikumpulkan maka data dikelompokkan menjadi jenis dan sumbernya. Adapun teknik penganalisaan yang digunakan adalah teknik deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan sesungguhnya sesuai dengan gejala-gejala dan permasalahan yang timbul dilapangan kemudian dilakukan interprestasi sehingga memperoleh sebuah kesimpulan.⁶¹ Dalam penelitian ini penulis menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banjarmasin di masa pemberlakuan pembatasan pergerakan masyarakat Kota Banjarmasin diluar rumah.

⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2006), hlm. 9.